

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Bursa Efek Indonesia**

Bursa efek di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Jogiyanto (2010) dalam bukunya berjudul “Teori Portofolio dan Analisis Investasi” melanjutkan sejarah dari Bursa Efek Indonesia secara runtut dan lanjut dari mulai berawalnya perdagangan efek di jaman penjajahan Belanda hingga dapat menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang saat ini ada. Perkembangan tersebut terbagi menjadi beberapa periode dan mengalami proses yang cukup panjang.

Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan sebagai penyelenggara pasar modal berbentuk perseroan terbatas (PT) yang disahkan oleh Undang-undang BAPEPAM-LK No. 8/1995 (Hadi, 2013). Selain itu, BEI juga merupakan penggabungan dari dua bursa efek besar di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Sebelum menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia), terdapat sejarah yang cukup panjang mengenai terbentuknya BEI di Indonesia. Sejarah perkembangan era pasar modal tersebut dituliskan oleh Jogiyanto (2010) sebagai berikut:

##### **1. Periode Pertama (1912-1942): Periode Jaman Belanda**

Di Indonesia pasar modal sudah dimulai saat Indonesia bernama Hindia Belanda. Pada era tersebut kegiatan perdagangan efek dimulai pada 14 Desember 1912 di Batavia (sekarang bernama

Jakarta), selanjutnya di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan disusul di Semarang tanggal 1 Agustus 1925. Saham yang diperdagangkan merupakan saham-saham perusahaan Belanda karena beroperasi pada jaman Belanda. Para pelaku pasar modal terbanyak adalah orang Belanda, Arab dan China. Kegiatan perdagangan efek pada periode ini ditutup ketika Perang Dunia II berlangsung (1940).

## 2. Periode Kedua (1952-1960): Periode Orde Lama

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.15/1952 tentang pasar modal. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Keuangan No.289737/U.U tanggal 1 November 1951, Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhirnya dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952. Pembukaan BEJ tersebut untuk menangani transaksi obligasi RI 3% tahun 1950. Kepengurusan bursa efek telah diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) pada tanggal 1 November 1951. Efek yang diperdagangkan pada waktu itu adalah Obligasi RI 3%, Obligasi Kotapraja Bogor 1937, Saham Escomto Bank dan Saham Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).

Kondisi perekonomian Indonesia di era orde lama ini lemah karena pemerintah belum sempat untuk memperbaiki kondisi perekonomian pasca kemerdekaan. Selain itu masih di sibukkan dengan kasus politik yang tidak stabil dan terjadi pemberontakan

di berbagai daerah. Keadaan perekonomian Indonesia pada saat itu menjadi semakin parah karena adanya sengketa antara pemerintah RI dengan Belanda tentang Irian Barat. Semua bisnis Belanda dinasionalkan melalui Undang-undang Nasionalisasi No.86 tahun 1958. Permasalahan ini mengakibatkan larinya modal Belanda dan mulai tahun 1969 sekuritas Belanda tidak diperdagangkan lagi di BEJ. Sejak saat itu aktivitas di BEJ semakin menurun (Jogiyanto, 2010).

### 3. Periode Ketiga (1977-1988): Periode Orde Baru

Pada saat masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto telah mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Daerah (UUPMA) tahun 1967. Kemudian disusul Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) tahun 1968. Setelah dikeluarkannya kedua Undang-undang tersebut perekonomian Indonesia mengalami keberhasilan.

Berdasarkan hasil Keputusan Presiden No. 52 tahun 1976 dan diikuti oleh surat Keputusan Menteri Keuangan bahwa Bursa Efek Jakarta (BEJ) diaktifkan kembali pada 10 Agustus 1977. PT Cibinong merupakan perusahaan pertama yang tercatat di BEJ. Selain itu berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1979 presiden telah menetapkan pendirian Pasar Modal, pembentukan Badan Pembina Pasar Modal, pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT. Danareksa. Pada periode ini hanya ada 24

perusahaan yang sudah *gopublic*. Bahkan selama 4 tahun (1985-1988) tidak ada perusahaan yang *gopublic*. Periode ini disebut juga sebagai periode tidur yang panjang.

4. Periode Keempat (1988-Mei 1995): Periode Bangun dari Tidur yang Panjang

Pasar modal Indonesia dikatakan tidur panjang karena selama 11 tahun (1977-1988) hanya ada 24 perusahaan yang *listing* di Bursa Efek. Setelah itu, selama tiga tahun (1988-1990) jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek meningkat sampai 128 dan di akhir tahun 1994 perusahaan yang sudah IPO (*Initial Public Offering*) menjadi 225 perusahaan. Pada tanggal 16 Juni 1989 dibukalah Bursa Efek Surabaya (BES). BES merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Drs. Basjiruddin Ahmad Sarida (mantan pejabat BAPEPAM) dan pada waktu itu masyarakat Indonesia sedang keranjingan dengan pasar modal. Pada tanggal 13 Juli 1992, BEJ diprivatisasi dan dipimpin oleh Drs. Hasan Zein Mahmud, MBA (mantan pejabat BAPEPAM). Sejak diprivatisasinya BEJ, fungsi BAPEPAM diubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

4. Periode Kelima (Mulai Mei 1995): Periode Otomatisasi

Pada periode ini, semua kegiatan transaksi yang pada mulanya dicatat dipapan tulis diotomatisasi dengan menggunakan jaringan komputer yang digunakan *broker* untuk perdagangan.

Pengotomatisasian tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan melebihi kapasitas manual. Sistem otomatisasi yang digunakan di BEJ adalah *Jakarta Automated Trading System (JATS)* dan mulai beroperasi pada 22 Mei 1995. Pengotomatisasian juga dilakukan di Bursa Efek Surabaya (BES) pada tanggal 19 September 1996 (diumumkan secara terbuka pada tanggal 10 Maret 1997). BES menerapkan sistem otomatisasi yang disebut dengan *Surabaya Market Information and Automated Remote Trading (S-MART)*.

5. Periode Keenam (Mulai Agustus 1997-September 1998): Krisis Moneter

Krisis moneter yang telah terjadi pada bulan Agustus 1997 menyebabkan tidak banyak perusahaan yang melakukan IPO, yaitu hanya 18 perusahaan. Krisis moneter ini dimulai dari penurunan nilai mata uang beberapa Negara Asia terhadap dolar Amerika yang disebabkan karena spekulasi dari pedagang-pedagang valas, kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah dan kurang kuatnya kondisi perekonomian.

Untuk mencegah banyaknya permintaan dolar Amerika, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan bank swasta menawarkan suku bunga deposito dari 25% sampai dengan 50% sehingga diharapkan investor menanamkan modalnya pada deposito dan tidak tertarik untuk

menanamkan dananya dipasar modal. Peristiwa tersebut menyebabkan harga-harga saham di pasar modal mengalami penurunan yang drastis.

6. Periode Ketujuh (Mulai Juli 2000): Tanpa Warkat

Pada bulan Juli 2000 BEJ mulai menerapkan perdagangan tanpa warkat (*striplesstradings*) karena warkat dianggap tidak efisien dan secara administratif penerbitan warkat juga akan menghambat proses penyelesaian transaksi.

7. Periode Kedelapan (mulai Oktober 1998 - Desember 2002):

Penyembuhan

Periode penyembuhan ini ditandai dengan naiknya IHSG yang berkisar 400 poin - 700 poin. IHSG mengalami peningkatan hingga 707,88 poin pada tanggal 14 Juni 1999. Peningkatan ini merupakan peningkatan tertinggi sejak Oktober 2008. Pada tanggal 16 April 2001 IHSG kembali turun sampai 365,82 poin. Hingga akhir tahun sebelum Natal tanggal 23 Desember 2002 IHSG bernilai 420,90 poin.

8. Periode Kesembilan (mulai Januari 2003-Januari 2008):

Kebangkitan Kembali

Pada periode kesembilan IHSG dapat dikatakan meningkat secara terus menerus sejak tahun 2003 sampai akhir tahun 2007. Selama lima tahun tersebut terjadi peningkatan IHSG lebih dari 470%. Kondisi seperti inilah yang menjadikan Indonesia sebagai

salah satu pasar modal yang paling berkembang atau dengan kata lain pasar modal Indonesia mengalami kondisi yang baik (*bullish*) dan IHSG sempat naik pada nilai 2.838,476 pada 14 Januari 2008.

9. Periode Kesepuluh (Mulai Oktober 2007): Bursa Efek Indonesia (BEI)

BEJ dan BES bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mulai efektif pada bulan November 2007. Penggabungan BEJ dan BES tersebut berdasarkan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2007.

10. Periode Kesebelas (Mulai Akhir Januari 2008): Krisis Global

Krisis global dimulai dari kasus *SubprimeMortgage* yang mengakibatkan City Bank mengalami kerugian sebesar 30%. Kejadian ini terjadi pada akhir Januari 2008 yang mengejutkan bagi pasar modal Indonesia. *SubprimeMortgage* merupakan kredit perumahan berisiko tinggi di Amerika Serikat dimana kredit ini diberikan kepada nasabah yang kondisi keuangannya kurang sehat. Kredit ini dijamin dengan perusahaan keuangan untuk mendapatkan pinjaman uang kembali sehingga mengakibatkan kredit macet dan menimbulkan kerugian yang besar pada beberapa *investment bank* dan *hedgefund*. *Investment bank* adalah bank yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang yang telah diperlukan oleh perusahaan dengan cara membeli, menjual, dan menjamin surat berharga yang diterbitkan

oleh sebuah perusahaan. *Hedgefund* merupakan kontrak investasi kolektif privat yang telah menerapkan perlindungan terhadap prinsipal dari dana investasi sehingga tidak akan hilang, hal ini disebabkan karena adanya pergerakan harga di bursa atau obligasi. Akibat selanjutnya adalah mereka menarik portofolio pada pasar modal di seluruh dunia dan mengakibatkan indeks IHSG pada pasar modal seluruh dunia menurun.

## **4.2 Profil Perusahaan**

### **4.2.1 Bank Pemerintah**

#### **A. Bank Negara Indonesia (BNI)**

BNI merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah dikenal sebagai Bank Negara Indonesia yang merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1946 dan perusahaan publik pertama yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996 untuk memperkuat struktur keuangan dan juga daya saing di tengah industri perbankan nasional. Hanya dalam beberapa bulan sejak pembentukannya, Bank Negara Indonesia telah mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama di Indonesia yaitu ORI atau Oeang Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun berdirinya yang digunakan sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank



Negara Indonesia 1946 telah resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Sehingga Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”.

Pada tahun 1988 telah melakukan perubahan identitas perusahaan dengan ditetapkan penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat yaitu “Bank BNI”.

Pada tahun 1992, status hukum dan nama BNI telah berubah menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dan keputusan untuk menjadi perusahaan publik telah diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. BNI mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi yang telah dicerminkan melalui identitas perusahaan yang telah disempurnakan dari masa ke masa. Hal ini ditegaskannya dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja yang diperbaharui secara terus menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang telah diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik dari sebelumnya yang telah berhasil mengarungi masa-masa sulit. Sebutan “Bank BNI” telah dipersingkat menjadi BNI dan tahun pendirian “46” digunakan sebagai logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggannya sebagai bank nasional pertama yang telah lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. BNI telah bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi

negeri serta menjadi kebanggaan negara, hal ini terinspirasi dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarah.

BNI merupakan salah satu bank yang terbesar di Indonesia yang memiliki 1.106 cabang dan sentra kredit yang tersebar di Indonesia dan 5 cabang yang berada di luar negeri (Singapura, Hongkong, Tokyo, New York dan London) serta perwakilan di beberapa negara di Timur Tengah

#### B. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada awalnya didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama DePoerwokertosche Hulpen Spaarbankder Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", yang merupakan suatu lembaga keuangan untuk melayani orang-orang yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Pada tanggal 16 Desember 1895 lembaga tersebut didirikan dan kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Setelah periode kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 telah disebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama yang ada di Republik Indonesia. Kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada

tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat pada saat masa perang untuk mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965 melalui PERPU No. 41 tahun 1960. BKTN telah diintegrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan dikeluarkannya Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan public dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

### C. Bank Tabungan Negara (BTN)

Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan salah satu bank yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Postspaar bank di Batavia pada tahun 1987 pada masa pemerintah Belanda merupakan cikal bakal Bank BTN dimulai beriri. Bank BTN untuk saat ini adalah salah satu bank yang berpengalaman di bidang pembiayaan perumahan dan industry, hal ini merupakan tugas yang diberikan Negara melalui kegiatan usaha yang dilakukannya dengan menyalurkan KPR dan Kredit lainnya serta menghimpun dana masyarakat melalui Tabungan, Deposito dan Giro untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) atau yang disebut dengan Bank BTN adalah salah satu Bank BUMN yang telah berdiri selama 56 tahun yang lalu, Bank BTN telah mampu mengamban tugas Negara dalam membantu sector perumahan rakyat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bank BTN terus melangkah maju di tengah pasang surut perekonomian makro dan persaingan perbankan yang cukup ketat sehingga hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat mampu membuat Bank BTN tetap terus menerus meningkatkan kinerja operasionalnya melalui berbagai perbaikan sistem. Memperkuat landasan untuk menjadikan Bank BTN sebuah bank umum dengan focus pada

pinjaman perumahan dan industry terus didorong untuk semakin diakselerasikan merupakan Restrukturisasi yang berkelanjutan yang digunakan.

Pada saat Bank BTN lahir telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 dari undang-undang tersebut mengatakan bahwa Bank BTN bukan bank yang baru dibentuk akan tetapi perubahan Bank Tabungan Posmenjadi Bank Tabungan Negara.

Status penegasan undang-undang pada Bank Tabungan Negara sebagai bank milik negaratelah ditetapkan dengan UU No. 20. tahun 1968 tanggal 19 Desember 1968. Pada tahun 1974 Bank Tabungan Negara telah ditambah tugasnya yaitu untuk memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR untuk masyarakat terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. Pada tahun 1976 tugas Bank Tabungan Negara ini dimulai merealisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) untuk pertama kalinya oleh BTN di negeri Indonesia. Berjalannyawaktu,akhirnya BTN merupakan satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam menjalankan tugas umum pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR-BTN. Hal ini hantarkan BTN pada kesuksesannya sebagai bank yang terpercaya, handal dan sehat.

Pada akhirnya telah tercatat sejarah sukses BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR hal tersebut telah membawa status BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) pada tahun 1992. Dengan adanya status persero ini memungkinkan BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsi yang dimilikinya yaitu sebagai bank umum. BTN mulai mengembangkan produk- produk layanan perbankan sebagaimana layaknya bank umum untuk mendukung bisnis KPR tersebut,. BTN juga memiliki produk tabungan, Giro, Deposito, ataupun layanan perbankan lainnya yang dimiliki oleh bank lain sebagai salah satu produk yang ditawarkan untuk nasabah.

#### D. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri Tbk didirikan di Negara Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998. Berdirinya Bank Mandiri melalui penggabungan dari 4 usaha yang pertama dari PT Bank Bumi Daya (BBD), berdirinya Bank Bumi Daya telah melalui suatu proses panjang yang bermula dari sebuah perusahaan Belanda, DeNationale Handelsbank NV dan menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Yang kedua yaitu PT. Bank Dagang Negara (BDN), Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara (BDN) dikenal sebagai *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1957. Yang ketiga yaitu

PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (*Bank Exim*) berawal dari perusahaan dagang Belanda NV, *Nederlanche Handels Maaatschappij* yang didirikan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalkan perusahaan ini pada tahun 1960, dan pada tahun 1965 menjadi Divisi Expor- Impor, yang pada akhirnya menjadi Bank Exim yang merupakan Bank Pemerintah untuk membiayai kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Yang keempat yaitu PT. Bank Pembangunan Indonesia (*Bapindo*) berawal dari Bank Industri Negara (*BIN*) merupakan salah satu Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Bank Industri Negara (*BIN*) memiliki misi untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya pada sektor perkebunan, industri, dan pertambangan. PT. Bank Pembangunan Indonesia (*Bapindo*) memiliki tugas untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata. Sehingga Pemerintah Republik Indonesia pada akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk melakukan merger atau penggabungan pada keempat bank tersebut disebabkan karena terjadinya krisis Universitas Sumatera Utara ekonomi regional sejak 1997 yang menyebabkan perlu adanya pembenahan pada sektor perbankan di Indonesia. Sehingga Pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asia

Development Bank (ADB) telah menetapkan kebijaksanaan dan program rekapitalasi serta restrukturisasi untuk bank umum baik pada bank swasta maupun pemerintah. Dilakukannya upaya restrukturisasi ini baik berupa perbaikan kualitas aktiva produktif maupun peningkatan efisiensi antara lain melalui pembenahan organisasi, sistem dan sumber daya manusia, penyempurnaan teknologi dan juga peningkatan pelayanan kepada nasabah merupakan salah satu langkah penting yang memungkinkan dunia perbankan untuk membantu pemulihan dunia perbankan Indonesia dan perbaikan sistem ekonomi di Indonesia. Dengan dilakukannya restrukturisasi atas penggabungan bank ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mempunyai organisasi dan sistem yang lebih efisien dan sumber daya manusia yang profesional dan produktif

#### **4.2.2 Bank Swasta**

##### **A. Bank CIMB Niaga**

Bank CIMB Niaga didirikan pada tanggal 26 September 1955 dengan nama pertama kali Bank Niaga. Fokus utama Bank Niaga adalah membangun profesionalisme dan nilai-nilai inti dibidang perbankan. Hal tersebut menjadikan Bank Niaga dikenal luas sebagai bank yang menyediakan produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Pada tahun 1987, Bank Niaga melakukan perubahan yang berbeda dari para pesaingnya di pasar



*domestic* dengan menjadi Bank pertama yang menawarkan para nasabahnya sebuah layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian yang telah dilakukan ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dunia perbankan modern.

Bank Niaga telah menjadi salah satu perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) pada tahun 1989. Keputusan yang diambil untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak yang bersejarah bagi Bank CIMB Niaga dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih luas bagi para nasabah. Dilakukannya langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan bank yang ada di seluruh pelosok negeri.

Selama beberapa waktu Pemerintah Republik Indonesia pernah menjadi pemegang saham mayoritas Bank CIMB Niaga pada saat terjadinya krisis keuangan di akhir tahun 1990-an. *CommerceAsset-Holding Berhad* (CAHB) saat ini dikenal luas sebagai *CIMB Group Holdings Berhad* (*CIMB Group Holdings*) yang telah mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak bulan November 2002,. Pada bulan Agustus 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke *CIMB Group* sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan *CIMB Group* dengan *platform universal banking*.

Bank Niaga telah memiliki reputasi yang sangat baik dibidang pelayanan nasabah dan tata kelola perusahaan, dan telah melahirkan banyak bankir handal di Indonesia.

Khazanah merupakan pemilik saham mayoritas CIMB *Group Holdings* yang telah mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lippo Bank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi milik CIMB Group pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagai bagian dari reorganisasi internal yang sama.

Sebagai pemilik saham pengendali dari Bank Niaga (melalui CIMB *Group*) dan Lippo Bank, sejak tahun 2007 Khazanah memandang penggabungan sebagai suatu upaya yang harus ditempuh agar dapat mematuhi kebijakan *SinglePresencePolicy*(SPP) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penggabungan ini merupakan merger pertama di Indonesia terkait dengan kebijakan SPP. Pada bulan Mei 2008, nama Bank Niaga berubah menjadi Bank CIMB Niaga.

Kesepakatan rencana penggabungan Bank CIMB Niaga dan Lippo Bank telah ditanda tangani pada bulan Juni 2008, yang dilanjutkan dengan permohonan persetujuan rencana penggabungan dari Bank Indonesia dan penerbitan pemberitahuan surat persetujuan penggabungan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia dibulan Oktober

2008. Lippo Bank secara resmi bergabung ke dalam Bank CIMB Niaga pada tanggal 1 November 2008 (*Legal Day 1* atau LD1) yang diikuti dengan pengenalan logo baru kepada masyarakat luas.

Bergabungnya Lippo Bank ke dalam Bank CIMB Niaga merupakan sebuah lompatan besar disektor perbankan Asia Tenggara. Bank CIMB Niaga kini menawarkan nasabahnya layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan dibidang perbankan ritel, UKM dan korporat dan juga layanan transaksi pembayaran. Penggabungan ini menjadikan Bank CIMB Niaga menjadi bank terbesar ke-5 dari sisi aset, pendanaan, kredit dan luasnya jaringan cabang. Dengan komitmennya pada integritas, ketekunan untuk menempatkan perhatian utama kepada nasabah dan semangat untuk terus unggul, Bank CIMB Niaga akan terus memanfaatkan seluruh daya yang dimilikinya untuk menciptakan sinergi dari penggabungan ini. Keseluruhannya merupakan nilai- nilai inti Bank CIMB Niaga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi masa depan yang sangat menjanjikan.

Sebagai usaha mewujudkan visinya menjadi bank yang terpercaya di Indonesia, strategi jangka panjang dan pendek telah disusun yang menjadi acuan bagi semua lini didalam CIMB

Niaga. Dalam jangka pendek CIMB Niaga akan memfokuskan beberapa bisnis yang sejalan dengan “Enam Pilar Prioritas”, antara lain ekspansi pembiayaan mikro, kartu kredit, kredit tanpa agunan, kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan mobil dan motor, peningkatan efisiensi dan pengembangan *alternate channel* serta pengembangan bisnis *value chain* untuk Perbankan Komersial dan Korporasi.

Dalam jangka panjang, CIMB Niaga akan memfokuskan strategi pada “Enam Pilar Prioritas” yaitu bisnis yang bermargin tinggi, diversifikasi dari sumber pendapatan, pertumbuhan dana murah, transformasi penjualan dan pelayanan, peningkatan efisiensi dan pengembangan sumber daya manusia. Strategi ini merupakan dasar untuk mendorong pertumbuhan terhadap unit-unit bisnis utama yang diharapkan mampu untuk menjadi motor pertumbuhan bisnis CIMB Niaga. Sejalan dengan itu CIMB Niaga juga akan memanfaatkan sinergi dengan anak perusahaan CIMB Group di Indonesia, serta dengan perusahaan-perusahaan CIMB Group lainnya melalui peningkatan kolaborasi ditingkat regional.

## B. Bank Maybank

PT. Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari

grup MalayanBanking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN.

Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959 dan telah mendapatkan izin sebagai salah satu bank devisa pada tahun 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang sekarang telah menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989.

Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun nasabah korporasi dengan melalui layanan Community Financial Services (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas digital banking melalui Mobile Banking, Internet Banking Maybank (mobile banking berbasis internet banking dan berbagai saluran lainnya)

### C. Bank Panin

PT. Bank Pan Indonesia Tbk atau yang disebut Panin Bank didirikan dari penggabungan usaha yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja dan Bank Industri dan Dagang Indonesia pada tahun 1971 dengan Akte No. 85 yang telah dibuat

dihadapan Julian Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., Notaris di Jakarta. Selanjutnya Panin Bank telah melakukan penggabungan usaha kembali dengan 4 bank swasta, yaitu PT. Bank Lingga Harta, Bank Abadi Djaja, Bank Pembangunan Ekonomi dan Bank Pembangunan Sulawesi.

Panin Bank telah meningkatkan pembangunannya dan melakukan kerja sama dengan institusi keuangan internasional Dai-Ichi Kangyo bank Jepang, CreditLyonnais Perancis, WestpacBanking Corporation Australia yang sekarang telah diambil alih oleh ANZ Banking Group.

Pada tahun 1982 merupakan tonggak penting dalam sejarah Panin bank karena pada tahun itu, perusahaan telah melakukan penawaran saham pertama di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut menjadikan Panin Bank sebagai bank Swata pertama di Indonesia yang melantai di bursa saham dengan kode PNBK. Panin Bank terus bertumbuh dan memantapkan operasionalnya meskipun diterpa oleh berbagai macam situasi perekonomian, salah satunya yaitu krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. PaninBank telah menjadi satu-satunya bank dari 10 bank yang masuk dalam kategori “A” sehingga Panin bank tidak wajib mengikuti program rekapitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pasca krisis PaninBank memperoleh peringkat sebagai Bank terbaik di

Industri perbankan nasional dari Moody's Investor Services pada 2001.

Panin Bank telah merangkum budaya perusahaan dan nilai-nilai kerja yang positif yaitu I CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence). Berlandaskan nilai-nilai tersebut, perusahaan berharap dapat mencapai visi dan misi yang ditetapkan yaitu menjadi Bank Komersial Terdepan dengan pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan.

#### D. Bank Permata

Bank Permata merupakan salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Bank Permata merupakan bank hasil dari penggabungan 5 bank dibawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu:

- 1) PT Bank Bali Tbk - Berdiri pada 1954
- 2) PT Bank Universal Tbk
- 3) PT Bank Prima Express
- 4) PT Bank Artamedia
- 5) PT Bank Patriot

Bank Bali telah ditunjuk untuk menjadi Bank Rangka pada tanggal 18 Februari 2002 dan berganti nama menjadi Bank Permata, sedangkan keempat bank yang lainnya sebagai bank yang menggabungkan diri. Penggabungan kelima bank uni merupakan implementasi dari

keputusan pemerintah mengenai Program Restrukturisasi Lanjutan yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2001, yang bertujuan untuk membentuk suatu bank yang telah memiliki struktur permodalan yang kuat, dengan kondisi keuangan yang sehat dan daya saing tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi, dengan jaringan layanan yang lebih luas dan produk yang dikeluarkan lebih beragam. Dan sebagian hasilnya, telah terbentuk Permata Bank sebagai bank yang berfokus dan standalone dan sejak awal telah berkomitmen untuk menekuni segmen UKM, ritel, dan komersial. Pada tahun 2004 Standard Chartered Bank dan PT. Astra Internasional Tbk telah mengambil alih Permata Bank dan memulai transformasi besar-besaran dalam organisasi.

#### 4.3 Analisis CAMEL Bank Pemerintah dan Bank Swasta

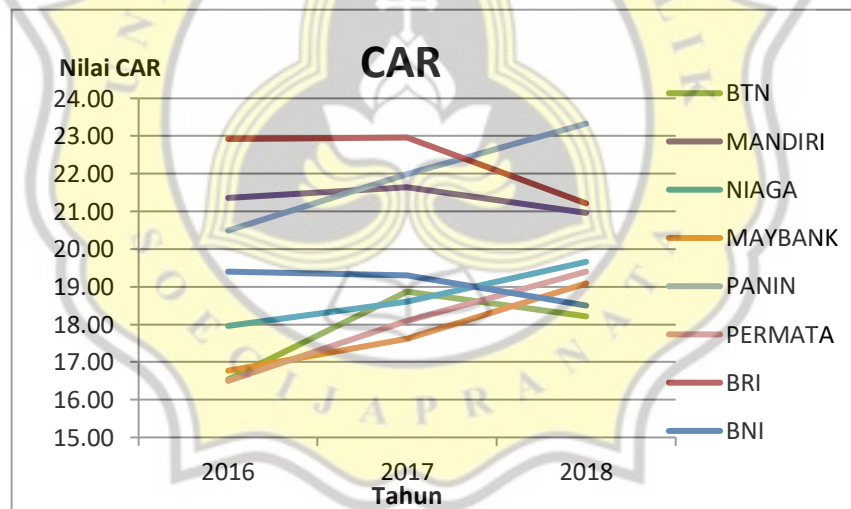
Tabel 1. Hasil penilaian kesehatan Bank Pemerintah dan Bank Swasta tahun 2016-2018

Bank	Tahun	Permodalan	Kualitas Aktiva Produktif	Manajemen	Rentabilitas		Likuiditas	CAMEL
		CAR	KAP	NPM	ROA	BOPO	LDR	
BNI	2016	19.40	2.00	79.70	2.70	73.60	90.50	94.72
	2017	10.30	1.50	79.08	2.80	70.50	90.00	94.77
	2018	18.50	1.30	76.64	2.80	70.10	88.80	94.16
BRI	2016	22.92	1.61	77.25	3.84	68.69	87.77	94.31
	2017	22.96	1.59	78.91	3.69	69.14	88.13	94.73
	2018	21.21	1.62	77.70	3.68	68.48	89.57	94.42
BTN	2016	16.54	2.64	77.86	1.76	82.48	102.66	85.74
	2017	18.87	2.48	77.60	1.71	82.06	103.13	89.15
	2018	18.21	2.65	77.91	1.34	85.58	103.25	88.64
MANDIRI	2016	21.36	3.07	74.14	1.95	80.94	84.31	93.54
	2017	21.64	2.73	75.82	2.72	71.78	83.69	93.95
	2018	20.96	2.42	73.73	3.17	66.48	83.31	93.43



CIMB NIAGA	2016	17.96	3.14	83.20	1.20	89.10	98.38	91.35
	2017	18.60	3.13	53.66	1.70	83.48	96.24	85.92
	2018	19.66	2.64	72.92	1.85	80.97	97.18	90.36
MAYBA NK	2016	16.77	2.82	407.89	1.60	84.36	88.92	96.93
	2017	17.63	2.23	271.78	1.23	86.97	96.46	95.58
	2018	19.09	2.11	274.65	1.48	83.85	88.12	99.93
PANIN	2016	20.49	2.16	55.82	1.69	83.02	94.37	87.21
	2017	21.99	2.11	93.14	1.61	85.04	92.10	97.44
	2018	23.33	2.49	72.91	2.16	78.27	104.15	87.57
PERMA TA	2016	16.50	6.30	9.58	4.90	150.80	80.50	36.89
	2017	18.10	3.30	94.60	0.60	94.80	87.50	93.90
	2018	19.40	3.50	120.94	0.80	93.40	90.10	96.75

Gambar 1. Grafik nilai Permodalan (CAR) Bank Pemerintah dan Bank Swasta



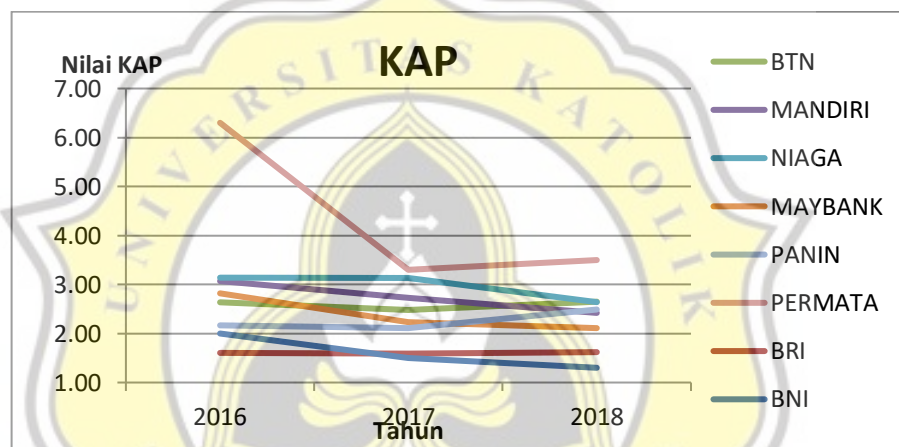
Indikator permodalan pada perusahaan perbankan digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan dari perusahaan perbankan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuiditas. Indikator permodalan pada penelitian ini dilihat dari nilai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dengan kriteria baik yang bernilai lebih dari 8%. Berdasarkan pada Gambar 1, maka dapat dilihat bahwa

seluruh perusahaan perbankan yang diteliti memiliki rasio CAR lebih dari 8% sejak tahun 2016 hingga 2018, meskipun terdapat beberapa perusahaan yang mengalami naik turun dalam rasio tersebut seperti terutama pada perusahaan bank pemerintah (BRI, BNI, dan Mandiri), di sisi lain perbankan milik swasta mengalami peningkatan rasio CAR pada tahun 2016 hingga 2018, sehingga dapat diketahui bahwa seluruh bank masuk dalam kategori sehat. Hasil ini cukup berbeda dengan hasil penelitian dari Siallagan dan Yuyetta (2016) yang menunjukkan bahwa perbankan swasta memiliki rasio CAR dengan nilai yang belum memenuhi kategori sehat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan swasta di Indonesia terus meningkatkan kinerjanya, sehingga pada saat ini masuk pada kategori sehat.

*Capital Adequacy Ratio* atau sering disebut dengan CAR merupakan sebuah cara untuk melihat tingkat kesehatan bank didasarkan pada modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Oleh karena itu, penilaian terhadap tingkat kesehatan bank sangatlah penting karena berguna untuk mengetahui kondisi bank dalam keadaan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik atau tidak baik. Dan nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perbankan pemerintah memiliki nilai ratio yang lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan swasta, tetapi lebih tidak stabil dibandingkan dengan perbankan swasta. Nilai CAR perbankan pemerintah secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018, sedangkan perbankan swasta memiliki grafik peningkatan CAR yang cenderung naik dari tahun 2016 ke tahun 2018. Hal

tersebut perlu menjadi koreksi bagi perbankan pemerintah, karena sudah cukup unggul dalam hal pengelolaan modal yang dibuktikan dengan nilai CAR, akan tetapi jika hal tersebut tidak dapat dipertahankan dan terus mengalami penurunan, maka bukan tidak mungkin jika perbankan swasta akan lebih unggul di masa yang akan datang.

Gambar 2. Grafik nilai Kualitas Aktiva Produktif Bank Pemerintah dan BankSwasta

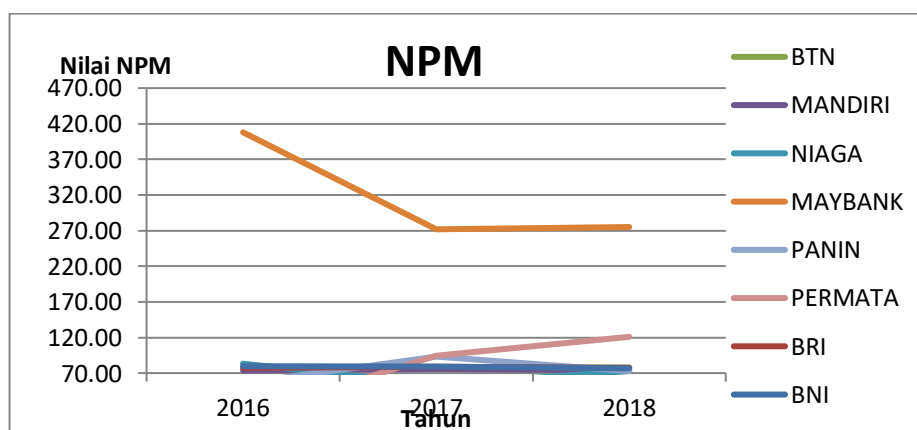


Indikator selanjutnya yang dibandingkan antara bank pemerintah dan perbankan swasta adalah pada indikator aktiva produktif yang dilihat dari nilai KAP (Kualitas Aktiva Produktif). Nilai indikator KAP yang baik atau sehat adalah kurang dari 10,25%. Gambar 2 pada penelitian ini menunjukkan grafik dari nilai KAP dari perusahaan perbankan swasta dan bank pemerintah negara yang menjadi objek dari penelitian masuk ke dalam kategori sehat pada nilai KAP. Dari Gambar 2, dapat dilihat bahwa perbankan swasta dan milik negara bersaing cukup ketat untuk menjaga kesehatan dari aktiva produktif mereka. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian dari Anita (2016) yang menunjukkan bahwa perbankan sempat tidak memenuhi kategori sehat pada hasil penelitiannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya bank swasta yang bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya, tetapi juga bank pemerintah.

Dari sisi penilaian perbankan pada Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa perbankan pemerintah memiliki kualitas aktiva produktif yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan swasta. Hal tersebut tidak hanya terdapat pada nilai KAP yang telah dibahas sebelumnya, tetapi juga dari sisi kestabilan perbankan pemerintah untuk terus memperbaiki nilai KAP. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga 2018 terlihat bahwa perbankan pemerintah dengan stabil terus menekan nilai KAP yang dimiliki. Di sisi lain, perbankan swasta memiliki nilai KAP yang naik turun sejak tahun 2016 hingga 2018. Dari penjelasan tersebut, maka terlihat dengan cukup jelas bahwa perbankan pemerintah lebih unggul dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya jika dibandingkan dengan perbankan swasta. Stabilitas tersebut juga dimungkinkan dipengaruhi oleh pengalaman perbankan pemerintah yang sudah memulai perusahaannya jauh lebih lama dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Gambar 3. Grafik nilai Manajemen (NPM) Bank Pemerintah dan Bank Swasta

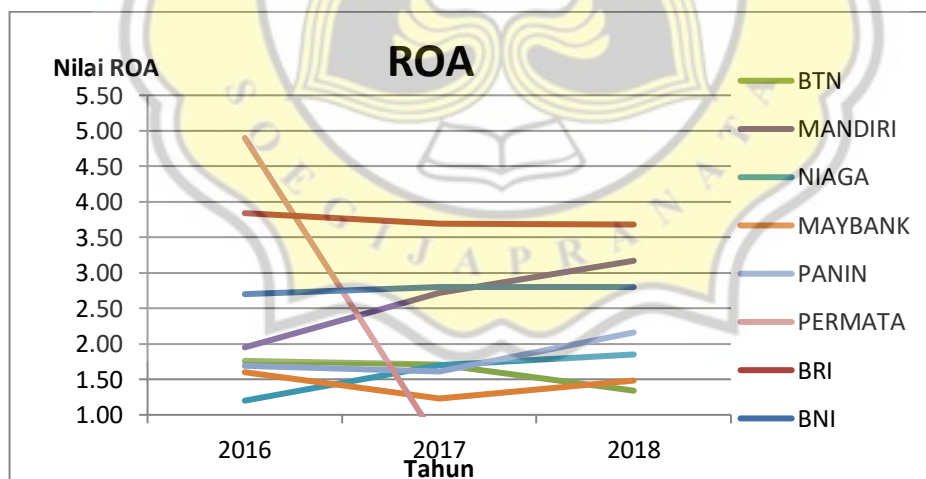


Indikator selanjutnya yang diambil untuk melihat kinerja dari perusahaan perbankan adalah pada indikator pengelolaan manajemen perusahaan yang diukur dengan nilai NPM (*net profit margin*) dimana kriteria nilai NPM yang baik adalah lebih dari 81%. Pada indikator ini, dapat terlihat dengan cukup mencolok perbedaan antara perbankan swasta dengan bank pemerintah seperti yang terlihat pada Gambar 3 di atas. Dari Gambar 3 dapat terlihat bahwa perusahaan perbankan dengan indikator NPM terbaik adalah Maybank dengan nilai indikator NPM yang tidak pernah kurang dari 81% sejak tahun 2016, kemudian disusul dengan Bank Permata yang juga nilai NPM-nya lebih dari 81% pada tahun 2018. Di sisi lain, bank pemerintah tidak ada yang mencapai nilai NPM 81%, sehingga tidak masuk dalam kategori sehat pada indikator NPM dan hanya masuk pada kategori cukup sehat. Hal serupa juga dijelaskan oleh Wahid (2016) pada penelitiannya yang juga menunjukkan bahwa bank pemerintah memiliki rata-rata indikator NPM yang belum memenuhi kategori sehat. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank pemerintah harus lebih memperhatikan indikator manajemen pada proses usahanya.

NPM (*net profit margin*) digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat pengelolaan manajemen dari sebuah perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan pemerintah memiliki kualitas pengelolaan manajemen yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perbankan swasta jika dilihat dari nilai NPM yang dimiliki oleh kedua jenis perusahaan perbankan tersebut. Dari tahun 2016 hingga 2018 juga terlihat bahwa perbankan swasta lebih stabil dalam menjaga tingkat kualitas pengelolaan manajemen dari perusahaannya

dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Di sisi lain, perbankan pemerintah masih harus berusaha lebih keras untuk dapat meningkatkan tingkat kualitas manajemen perusahaan agar dapat lebih baik daripada perbankan swasta, terutama Mandiri yang memiliki kualitas manajemen lebih rendah dari perbankan lainnya jika dilihat dari nilai NPM. Perbankan swasta yang memulai usahanya pada era yang lebih modern jika dibandingkan dengan perbankan pemerintah memiliki keuntungan dalam menerapkan strategi dalam proses manajemen perusahaan, hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan mengapa perbankan swasta memiliki sistem pengelolaan manajemen yang lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan pemerintah.

Gambar 4. Grafik nilai Rentabilitas (ROA) Bank Pemerintah dan Bank Swasta



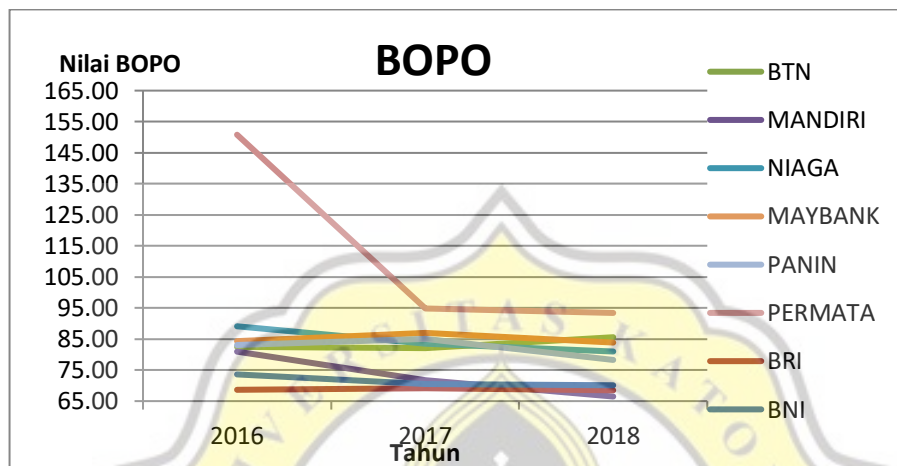
Indikator rentabilitas digunakan untuk melihat tingkat kemampuan dan efektivitas dari perusahaan perbankan dalam memperoleh keuntungan. Indikator ini dinilai dengan melihat nilai *Return On Asset* (ROA) dengan kriteria sehat jika nilai ROA lebih dari 1,22%. Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa seluruh perusahaan perbankan memiliki nilai ROA yang memenuhi kategori sehat,

kecuali Bank Permata pada tahun 2017 dan 2018 yang justru mengalami penurunan drastis pada nilai ROA yang dimiliki. Di sisi lain, perbankan milik pemerintah kembali unggul pada indikator ini dengan nilai ROA tertinggi pada BRI yang hampir stabil sejak tahun 2016 hingga 2018, kemudian diikuti oleh BNI dan Bank Mandiri. Perbankan swasta nilai yang baik pada indikator ini adalah Bank Panin dengan nilai ROA tertinggi jika dibandingkan dengan nilai ROA perbankan swasta lainnya yaitu sebesar 2,16% pada tahun 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Yuyetta (2016) yang juga menunjukkan bahwa indikator ROA yang dimiliki oleh bank pemerintah lebih baik jika dibandingkan dengan nilai ROA yang dimiliki oleh perbankan swasta.

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah memperoleh keuntungan, sehingga indikator ROA menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat kesehatan sebuah perusahaan, terutama perbankan. Dari hasil penelitian ini, berdasarkan pada nilai ROA pada setiap bank diketahui bahwa perbankan dengan perolehan keuntungan lebih baik dari tahun 2016 hingga 2018 adalah perbankan pemerintah, terutama BRI. Hal tersebut terjadi dikarenakan tingkat jangkauan dari perbankan pemerintah yang mampu jauh lebih luas jika dibandingkan dengan perbankan swasta, sehingga potensi perolehan keuntungan semakin tinggi. Bukti sederhana yang dapat dilihat adalah jangkauan akses perbankan seperti mesin ATM, kantor cabang perbankan, hingga program-program untuk masyarakat yang dapat difasilitasi secara lebih luas oleh perbankan

pemerintah, dibandingkan dengan perbankan swasta. Maka dari itu, keuntungan dari perbankan pemerintah dapat lebih tinggi.

Gambar 5. Grafik nilai Rentabilitas (BOPO) Bank Pemerintah dan Bank Swasta

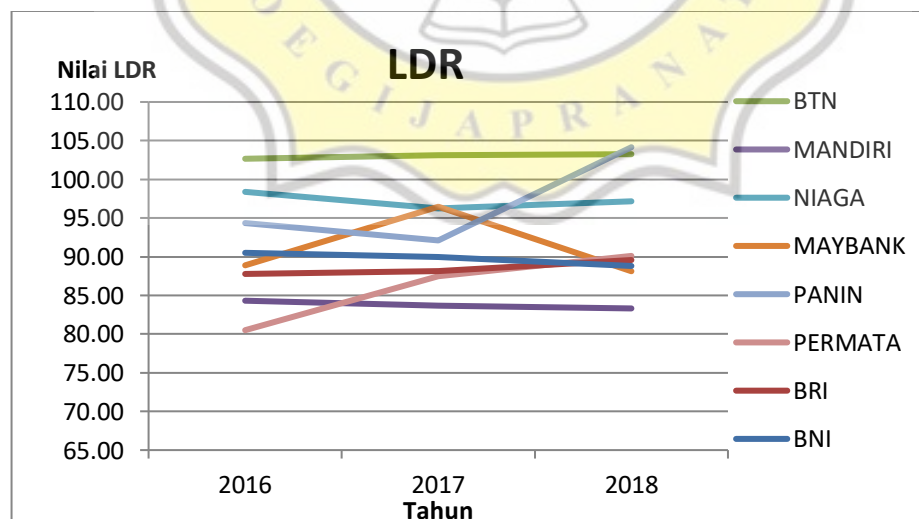


Indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur rentabilitas adalah nilai pada Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Perusahaan perbankan dikatakan sehat jika nilai BOPO berada kurang dari 93,52%. Hasil dari indikator BOPO tidak jauh berbeda dengan hasil dari indikator ROA yang telah dibahas sebelumnya. Pada indikator ini, perusahaan bank pemerintah tetap lebih unggul dari perbankan swasta seperti dapat dilihat pada Gambar 5. Pada grafik yang terlihat di Gambar 5 juga menunjukkan bahwa hampir keseluruhan bank memiliki nilai BOPO yang masuk kategori sehat kecuali Bank Permata pada tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan bank masuk dalam kategori sehat pada indikator BOPO. Hasil penelitian ini kembali serupa dengan hasil penelitian dari Kaligis (2013) yang menunjukkan bahwa bank pemerintah telah memiliki nilai BOPO yang sehat.



Nilai dari rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) menunjukkan efektifitas sebuah perusahaan dalam mengelola operasional mereka. Di dalam penelitian ini, perbankan pemerintah memiliki efisiensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan perbankan swasta. Hasil tersebut sudah sepatutnya terjadi, karena perbankan pemerintah memiliki pengalaman yang jauh lebih lama dibandingkan dengan perbankan swasta, bahkan beberapa diantaranya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Selain itu, perbankan pemerintah juga memiliki jangkauan yang lebih luas sehingga memiliki strategi yang lebih baik dapat mengoptimalkan biaya operasional serta pendapatan operasional yang dimiliki. Di sini lain, perbankan swasta sebagian besar mulai beroperasi setelah kemerdekaan Indonesia, sehingga terdapat perbedaan yang cukup jauh dari sisi pengalaman dalam dunia perbankan.

Gambar 6. Grafik nilai Likuiditas (LDR) Bank Pemerintah dan Bank Swasta



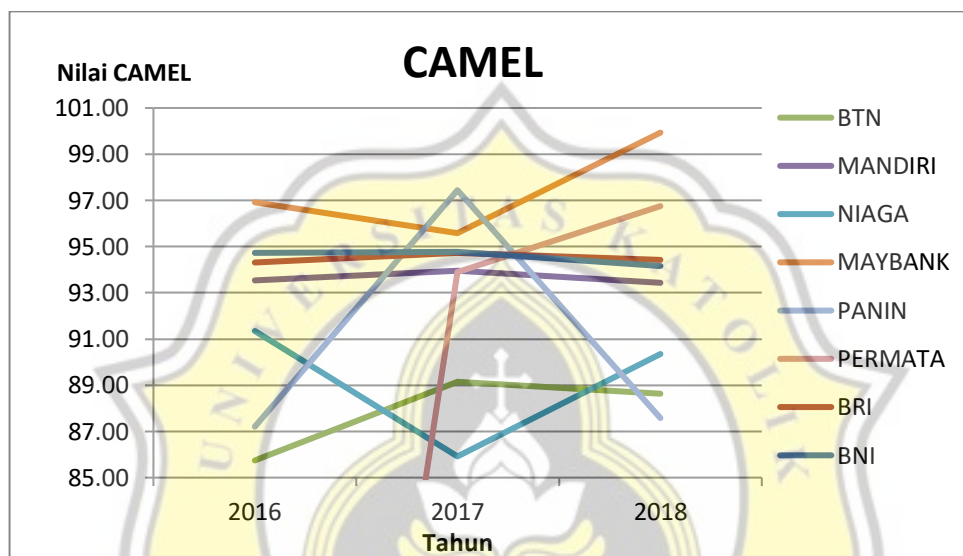
Indikator terakhir yang digunakan pada analisis CAMEL pada penelitian ini adalah indikator likuiditas yang dilihat dari rasio LDR dimana nilai LDR

dikatakan sehat apabila kurang dari 94,75%. Gambar 6 menunjukkan nilai LDR yang terdapat pada bank pemerintah dan swasta yang menjadi objek pada penelitian ini. Dari Gambar 6 tersebut dapat dilihat bahwa secara umum, rasio LDR dari bank pemerintah masuk dalam kategori sehat, kecuali pada BTN yang belum masuk pada kategori nilai LDR yang sehat sejak tahun 2016 hingga 2018. Hal tersebut juga terlihat pada tahun 2018 dimana bank pemerintah (Mandiri, BNI, dan BRI) menunjukkan nilai LDR yang lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan swasta, yaitu dengan nilai 83,31% pada Mandiri, kemudian diikuti oleh BRI dan BNI. Di sisi lain, perbankan swasta dengan nilai LDR yang secara stabil masuk dalam kategori sehat hanyalah pada bank Permata, sedangkan bank lainnya masih secara fluktuatif. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Siallagan dan Yuyetta (2016) yang menunjukkan hasil dimana perbankan swasta memiliki nilai LDR yang lebih baik jika dibandingkan dengan bank pemerintah pada tahun 2013 – 2015.

Rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis likuiditas perbankan atau melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Di dalam hal ini, perbankan swasta yang sudah cukup baik hanyalah bank Permata, sedangkan perusahaan perbankan swasta lainnya masih belum masuk dalam kategori sehat untuk indikator likuiditas tersebut. Selain itu tingkat rasio LDR dari perbankan pemerintah juga dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan swasta jika dilihat dari stabilitas rasio itu sendiri. Perbankan pemerintah memiliki stabilitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan

perbankan swasta. Stabilitas tersebut juga dimungkinkan dipengaruhi oleh pengalaman perbankan pemerintah yang sudah memulai perusahaannya jauh lebih lama dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Gambar 7. Grafik nilai CAMELS Bank Pemerintah dan Bank Swasta



Analisis utama di dalam penelitian ini adalah nilai CAMELS pada setiap perusahaan perbankan, baik bank pemerintah maupun swasta. Nilai CAMELS merupakan acuan untuk melihat tingkat kesehatan dari perbankan, kriteria pada analisis CAMELS agar suatu bank dapat dikatakan sehat adalah bank yang memiliki nilai CAMELS lebih dari 81%. Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa perbankan dengan nilai CAMELS yang cukup stabil adalah pada bank pemerintah yaitu Mandiri, BNI, dan BRI, sedangkan BTN cukup stabil meskipun dengan nilai yang cukup jauh dibandingkan dengan perbankan pemerintah lainnya. Di sisi lain, perbankan swasta memiliki nilai CAMELS yang cukup fluktuatif dari tahun 2016 – 2018 meskipun masih masuk dalam kategori sehat.

Jika dilihat dari Gambar 7, maka dapat diketahui bahwa perbankan swasta dengan nilai CAMELS yang lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan pemerintah secara stabil hanyalah Maybank, sedangkan perbankan swasta lainnya secara umum masih di bawah nilai perbankan pemerintah. Begitu pula dengan BTN yang menjadi satu-satunya perbankan pemerintah yang nilai CAMELS-nya masih di bawah perbankan swasta. Dari hasil tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai CAMELS dari perbankan pemerintah maupun swasta secara umum masih masuk dalam kategori sehat meskipun terdapat beberapa indikator dari bank tersebut yang belum masuk dalam kategori sehat. Hasil dan kesimpulan tersebut sama dengan penelitian dari Siallagan dan Yuyetta (2016) yang menunjukkan bahwa perbankan pemerintah dan bank swasta secara umum masih masuk dalam kategori sehat jika dilihat dengan menggunakan analisis CAMELS, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum masuk dalam kategori sehat. Dari hasil tersebut juga terlihat bahwa perbankan pemerintah lebih stabil dalam menjaga kesehatan perusahaannya. Stabilitas tersebut juga dimungkinkan dipengaruhi oleh pengalaman perbankan pemerintah yang sudah memulai perusahaannya jauh lebih lama dibandingkan dengan perusahaan swasta.